Public Policy
Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan

ISSN: 3063-7562
DOI: https://doi.org/10.61166/policy.v2i8

Vol. 2 No. 1 (2025)
pp. 39-52

Research Article

Preferensi Pemilih Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu Tahun 2012

Dewi Nurmala Sari[1], Toto Kushartono[2]

1. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wiralodra; dewinurmalasari@gmail.com
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Unjani – Cimahi;

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan.** This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : December 12, 2024
Revised : January 24, 2025
Accepted : February 15, 2025
Available online : March 26, 2025

How to Cite: Dewi Nurmala Sari. (2025). Student Voter Preferences Wiralodra University Indramayu 2012. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(1), 39–52. https://doi.org/10.61166/policy.v2i1.8

Student Voter Preferences Wiralodra University Indramayu 2012

Abstract. After the 1998 Reformation movement, Indonesia experienced a transition process involving political institutionalization as an effort to consolidate democracy and decentralize government. The transition process has produced several positive things for the Indonesian nation, including increasing people's political participation. The researcher wanted to see the preferences of voters among students at Wilalodra University Indramayu. Voting behavior can be shown in voting and determining who will be elected as a public official in the election. Voting in the election is realized by voting for the political party they support or is shown by the behavior of the community in choosing a pair of legislative and executive candidates such as President/Vice President, Regent/Vice Regent or Mayor/Vice Mayor.

Keywords: Voter Preferences, Political Participation, Students.

Abstrak. Pasca gerakan Reformasi 1998, Indonesia mengalami proses transisi yang melibatkan pelembagaan politik sebagai upaya konsolidasi demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Proses transisi telah menghasilkan beberapa hal positif bagi bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya meningkatkan partisipasi politik rakyat. Peneliti ingin melihat preferensi pemilih dari kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas Wilalodra Indramayu. Perilaku memilih dapat ditunjukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pejabat publik dalam Pemilu. Pemberian suara dalam pemilu diwujudkan dengan memberikan suara pada partai politik yang didukungnya atau ditunjukan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pasangan calon anggota legislatif dan eksekutif seperti Presiden/Wakil Presiden, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Kata Kunci: Preferensi Pemilih, Partisipasi Politik, Mahasiswa.

PENDAHULUAN

Nilai klasik dari demokrasi umumnya ditakar dari seberapa besarKesadaran rakyat berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada sebuah Pemilihan Umum (Pemilu). Ada anggapan, semakin besar suara yang diberikandalam pemilu maka semakin dianggap demokratis Pemilu tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit suara yang diberikan angka partisipasi rakyat dianggap rendah dan nilai demokrasi dari pemilu tersebut diragukan. Di masa Orde Baru, partisipasi masyarakat dalam pemilu cukup tinggi, akan tetapi partisipasi tersebut tidak cukup menggambarkan makna dari partisipasi masyarakat yang sebenarnya. Selama 32 tahun, rezim Orde Baru telah menciptakan suatu lingkungan politik dan terkontrol, dimana partisipasi politik masyarakat terkukung dalam batasan-batasan demokrasi yang semu.

Rezim Orde Baru yang mendominasikan kehidupan politik saat itu memobilisasi masyarakat dalam setiap pemilu dengan intimidasi, kekerasan dan manipulasi. Maksud dari semua itu adalah untuk menciptakan kestabilan politik dan kesuksesan pembangunan, ketimbang memiliki kehidupan yang demokratis, dengan kata lain karakteristik partisipasi yang termobilisasi (mobilized participation) sepanjang sejarah Orde Baru, tidak bisa dikatakan sebagaPartisipasi yang berkualitas, yang demokratis dan otonom (outonomous participation).

Sistem politik yang diciptakan pada masa itu. tidak menyediakan alternatif pilihan politik dalam setiap pemilu (pada waktu itu partai politik yang ada adalah PPP,Golkar,dan PDIP); terbatasnya informasi media yang didapat (hal ini ditandai dengan adanya mekanisme pemberendelan bagi media yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah), terbatasnya kesempatan untuk berdialog, berserikat dan lain-lainnya.

Pada Tahun 1998 terjadi perubahan politik nasional yaitu jatuhnya Presiden Soeharto, yang menandai runtuhnya rezim Orde Baru. Pemilu Tahun 1999 merupakan Pemilu yang melibatkan partai-partai politik baru. Dalam Pemilu Tahun 1999, masyarakat mendapat kesempatan untuk memilih partai partai-politik alternatif disamping PPP, Golkar, dan PDI, Akan tetapi dalam Pemilu Tahun 1999 masih menggunakan sistem lama. Representasi legislatif masih ditentukan oleh pengurus pusat partai politik yang bersangkutan dan masih diwarnai oleh

pertimbangan berbagai kepentingan politik. Partisipasi politik dalam Pemilu tahun 1999 masih belum mencerminkan kematangan partisipasi politik yang sesungguhnya.

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan berbeda dengan Pemilu Tahun 1999. Pertama, Pemilu untuk memilih anggota legislatif yang terdiri dari DPR DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota dan DPD, dengan menggunakan sistem pemilihan dengan cara proporsional daftar terbuka; Kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dan Ketiga, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (selanjutnya disebut Pilkada secara langsung) baik gubernur, bupati/walikota oleh rakyat di daerah. Pasca gerakan Reformasi 1998, Indonesia mengalami proses transisi yang melibatkan pelembagaan politik sebagai upaya konsolidasi demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Proses transisi telah menghasilkan beberapa hal positif bagi bangsa Indonesia, termasuk didalamnya meningkatkan partisipasi politik rakyat, tapi juga menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar akan dampak negatifnya.

Terjadinya perubahan politik ke era Demokrasi belum menghasilkan perubahan mendasar kecuali perubahan peta kekuatan politik. Pergeseran politik saat ini ditandai tigakonteks: pertama, peranan partai politik mulai naik kembali sebagai aktor utama dalam sistem politik; kedua, keluarnya atau mundurnya kekuatan militer secara resmi dari pentas pentas politik. Ketiga, menguatnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) dalam berbagai aspek kehidupan.

Di daerah era reformasi dewasa ini yang membuka peluang bagi perkembangan nya ruralisasi dan polarisasi kepartaian, termasuk keterbukaan pola rekrutmen politik, mirip pengalaman era Demokrasi Parlementer tahun 1950-an di masa lalu, kiranya kita telah menyaksikan bersama suatu kontestasi seru persaingan partai dan politisi yang berlomba untuk dapat merebut kursi atau minimal berubah usaha mempengaruhi kinerja pemerintahan. Khususnya di level daerah/lokal dari provinsi hingga kota/kabupaten,Realitas ini bahkan seolah kian terlegitimasikan penguatannya lewatUndang-Undang Pemerintahan Daerah, baik Undang Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telahditinggalkan maupun Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya yang bersemangatkan otonomi daerah.

Pada Bulan Februari tahun 2013, masyarakat Jawa Barat akan melaksanakan Pemilukada untuk memilih gubernur dan calon gubernur. Pertarungan menuju Jabar 1 semakin menarik untuk diikuti pertarungan tersebut melibatkan tokoh-tokoh Pantura sebut saja DR.H Irianto MS Syafuiuddin (Mantan Bupati Indramayu/Ketua DPD Partai Golkar), Drs Dedi Supardi, MM(Bupati Cirebon),H Aang Hamid Suganda (Bupati Kuningan) serta Eef Saefudin (Bupati Subang non aktif).Sementara itu tokoh lain yang akan muncul antara lain Ahmad Heryawan (Pertahana PKS), Dede Yusuf (Wakil gubernur/Partai Demokrat),Dada Rosada (Walikota Bandung).

Dari uraian tersebut peneliti ingin melihat preferensi pemilih dari kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas Wilalodra Indramayu. Atas dasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana Preferensi Pemilihan Mahasiswa Universitas Wilalodra Indramayu Tahun 2012.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang preferensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi Pemilih Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu Tahun 2012.Kontribusi

pemilihan penelitian ini bermanfaat bagi semua stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum seperti KPU, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Partai Politik, Perguruan Tinggi dan lainnya. Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan civititas akademika Universitas Wiralodra, dimana akan diketahui bagaimana sikap mahasiswa terhadap persoalan-persoalan di lingkungan sekitarnya.

LANDASAN TEORI

Dalam Pemilu secara langsung baik pemilu legislatif maupun Pemilu eksekutif, pemilih akan mengapresiasikan pilihannya sesuai dengan pilihan politiknya. Dalam Pemilukada misalnya, perbedaan ketika pada masa Orde Baru Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, yang kadang-kadang pilihan anggota DPRD tidak mencerminkan keinginan konstituennya.Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan lokal (dalam hal ini PilkadA secara langsung) sebagai salah satu bentuk partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Sejauhmana orang menerima perangsangan politik (peka/tidak); (b) Karakteristik pribadi seseorang (sikap/perasaan seseorang); (c) Karakteristik sosial seseorang (status sosial ekonomi,ras, etnis, usia, agama, sex) dan; (d) Keadaan politik/lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri (sistem politik, sistem partai,sistem pemilihan) atau perbedaan regional juga menyajikan tipe dan faktor lingkungan lainnya yang sering menjadi dasar munculnya Keanekaragaman dalam tingkah laku elektoral dan bentuk-bentuk lainnya dan partisipasi politik.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik ialah: (a) Kesadaran politik: kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik; (b) Kepercayaan pada pemerintah: penilaian seseorang terhadap pemerintah. Kedua faktor tersebut bukan faktor yang berdiri sendiri hal ini dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti struktur sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi,Dengan demikian terlihat bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Partisipasi politik berwujud melalui: (a) Kegiatan pemilihan mencangkup pemberian suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan umum. (b) Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok-kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. (c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. (d) Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditunjukkan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. (e) Tindakan kekerasan (violence) merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefisinikan sebagai satu kategori sendiri artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Perilaku memilih dapat ditunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan partai politik yang akan dipilih dan siapa yang akan dipilih menjadi anggota legislatif, pilpres maupun Pemilukada. Pemberian suara atau voting secara umum dapat diartikan sebagai semua proses dimana Seorang anggota dalam satu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil". Pemberian suara dalam pemilukada diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang umumnya atau ditunjukkan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Adapun perilaku memilih menurut Surbakti adalah:"Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) didalam suatu PemilihanUmum. Bila voters memutuskan memilih (to vote) maka voters akan memilih/mendukung kandidat tertentu"

Untuk memperoleh gambaran yang cukup komprehensif tentang fenomena pemilih, penelitian menggunakan metode community dynamic study yang tampaknya memadai untuk digunakan. Jelas penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa tingkah laku politik sangat dipengaruhi oleh situasi komunitas dimana seseorang berada. Karena untuk memahami tingkah laku individual, termasuk keputusan memilih, harus dihubungkan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya interaksi antar anggota masyarakat, yang kemudian menentukan interprestasi seseorang terhadap satu fenomena sosial.

Peter Bryant mengemukakan bahwa: "Persepsi seseorang ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang diyakini dengan hal-hal yang diharapkan.Semakin kecil jarak (gap) antara keduanya, akan semakin baik persepsi seseorang terhadap satu fenomena.Karena itu persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, latar belakang sosial-budaya, motivasi dan suasana hati". FremondE Kast dan J.E Rozenwigh mengatakan : "Persesi sangat menentukan sikap seseorang. Melalui persepsi yang berfungsi sebagai filter (saringan) seseorang membangun kepercayaan dan motivasi terhadap satu stimulus (dalam hal ini fenomena sosial), yang kemudian menentukan perilakuSeseorang. Peran sentral persepsi dalam pembentukan atau menentukan tingkah laku seseorang, digambarkan dalam satu diagram oleh Chung dan Megginson.

Diagram 1.1
Hubungan antara Persepsi dan Tingkah Laku

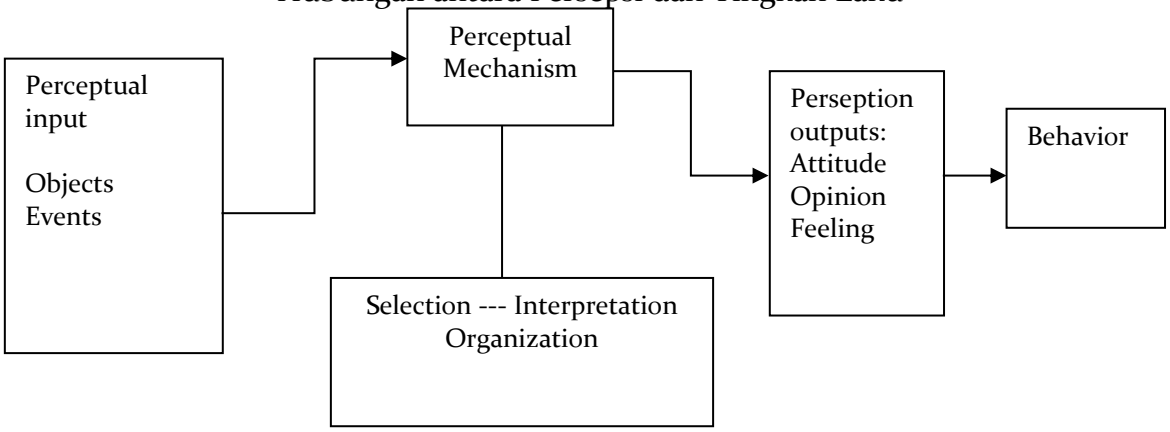

Lebih lanjut Imawan mengemukakan bahwa: "Perceptual input" disini pada dasarnya berupa rangsangan (stimulus) yang datang dari luar diri seseorang. Stimulus yang masuk, akan diolah dulu dalam suatu proses yang disebut "Perseptual Mechanism" Dalam proses ini terjadi proses yang lebih kecil lagi, yakni seleksi, organisasi, dan interprestasi terhadap stimulus yang ada. Dalam proses inilah berperan pengalaman serta norma-norma kemasyarakatan yang diyakini seseorang.Produk dari "Perceptual Mechanism" itu dapat berwujud sikap, opini, ataupun perasaan terhadap stimulus:yang akhirnya akan menentukan tingkah laku seseorang.

Perilaku pemilih dalam pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut: Masuknya rangsangan-rangsangan (stimulus) yang datang dari luar seorang Pemilih. Rangasangan tersebut bisa berupa pengalaman memilih dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara langsung; pengaruh kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan lain –lain.Rangsangan tersebut, kemudian diolah dalam suatu proses yang disebut perseptual Machanism, dari seleksi yang masuk kedalam pikiran pemilih, pemilih akan menginterprestasikan siap alternatif-alternatif pilihan (kepada semua suara pemilih akan diberikan nantinya-*pen*).

Dari seleksi dan interprestasi tersebut, akan diorganisasikan dalam pikiran pemilih, dan dalam proses ini akan berperan pulau faktor-faktor lain seperti pengalaman pemilihan nilai-nilai atau norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dan diyakini tidak bertentangan dengan keyakinan pemilih.Produk dari Perceptual Mechanism berupa sikap mendukung Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, opini yang berkembang di masyarakat (seperti apakah pasangan calon tersebut baik atau tidak baik?), perasaan pemilih terhadap pasangan calon (suka atau tidak suka?), yang mana semua itu, akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum

Pemilu dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung, berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara; Umum, pada dasarnya semua Warga Negara yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota. yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak mengikuti Pemilu.Asas umum Ini mengandung pula makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial; Bebas, berarti dalam pemilu setiap warga Negara yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dalam melaksanakan haknya warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya; Rahasia, dalam memberikan suaranya Pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.Pemilih memberikan suaranya pada-pun suara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan; Jujur, dalam menyelenggarakan pemilu, setiap penyelenggara Pemilu (KPI), aparat pemerintah, calon atau peserta pemilu, pengawas (Panwaslu), pemantau Pilkada secara langsung, pemilih serta semua pihak yang berkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Adil, dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan calon atau peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam Pelaksanaan Pemilu yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat politik yang memenuhi indikator demokrasi. Dalam pemilu yang terjadi perhatian adalah apakah Pemilu berdampak positif atau tidak bagi pengembangan Demokrasi. Afan Gaffar mengemukakan bahwa indikator untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain : (1) pemilihan umum; (2) Rotasi kekuasaan; (3) Rekrutmen secara terbuka; (4) Akuntabilitas publik; dan (5) Menikmati hak-hak dasar;

Penjelasan dari masing-masing point tersebut dan hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada langsung, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum
   Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan Pemilu, termasuk dalam hal ini adalah Pemilu lokal (Pilkada langsung-*pen*) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas,kompetitif, jujur dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati, kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberi ganjaran atau hukuman (*reward dan punishment*) dalam pemilihan mendatang.Penjabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang terkena dihati masyarakat dipilih kembali.

2. Rotasi kekuasaan
   Rotasi kekuasaan juga merupakan indikator demokrasi setidaknya dalam suatu rekrutmen pejabat politik.Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa. Kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki.Artinya, kalau seseorang yang berkuasa terus-menerus atas satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu sistem itu tidak layak disebut demokratis.Dangan lain kata, demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari sesuatu partai politik ke partai politik yang lain.
3. Rekrutmen Terbuka
   Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati.DiNegara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok kecil orang.
4. Akuntabilitas Publik
   Para pemegang jabatan politik (juga pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik.Seseorang pejabat publik harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A, bukannya kebijakan B,mengapa menaikkan pajak daripada melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan KKN.Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik.Demikianpula yang dilakukan keluarga terdekatnya, sanak saudaranya, dan bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkandengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut.Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.
5. Menikmati hak-hak dasar
   Dalam suatu Negara yang demokratis, setiap warga Negara dapat mengikuti hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat *(freedom of expression),* hak untuk berkumpul dan berserikat *(freedom of family)*, dan hak untuk menikmati pers yang bebas *(freedom of the press)*. Dalam kaitannya dengan Pemilu, hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan pilihan politiknya terhadap seorang kandidat.Kebebasan berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dalam bentuk menjadi anggota partai politik, masuk menjadi tim sukses tanpa dihalang-halangi oleh siapapun dan oleh institusi manapun. Kebebasan pers mempunyai makna bahwa masyarakat dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu perlu dalam Pilkada secara langsung. sepanjang dia tidak memihak salah satu kandidat, tidak mengadu domba masyarakat dan lain-lain.

Berkaitan dengan pemilu, Sanit menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum sebagai salah satu bentuk partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Sejauh mana orang menerima para jangan politik

(peka/tidak); (b) Karakteristik pribadi seseorang (sikap perasaan seseorang); (c) Karakteristik sosial seseorang (status sosial ekonomi, ras, etnis, usia, agama, sex) dan; (d) Keadaan politik : lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri (sistem politik, sistem partai,sistem pemilihan) atau perbedaan regional juga menyajikan tipe dan faktor lingkungan lain yang sering menjadi dasar munculnya Keanekaragaman dalam tingkah laku elektoral dan bentuk-bentuk lain dari partisipasi politik.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, menurut peneliti adalah: (a) Kesadaran politik kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik; (b) Kepercayaan pada pemerintah: penilaian seseorang terhadap pemerintah. Kedua faktor tersebut bukan faktor yang terdiri sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Dengan demikian melihat bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Ringtone Huntington partisipasi politik berwujud melalui: (a) Kegiatan pemilihan mencakup pemberi yang suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye,bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan umum; (b) Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok-kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang; (c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah; (d) Mencari koneksi *(contacting)* merupakan tindakan perorangan yang diajukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang; (e) Tindakan kekerasan *(violence)* merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa ada manfaat untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori sendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

2. Perilaku Pemilih

Perilaku memilih dapat ditunjukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pejabat publik dalam Pemilu. Pemberian suara dalam pemilu diwujudkan dengan memberikan suara pada partai politik yang didukungnya atau ditunjukan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pasangan calon anggota legislatif dan eksekutif seperti Presiden/Wakil Presiden, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Adapun perilaku pemilih menurut Surabakti adalah: Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih *(to vole or not lo)* di dalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung-*pen)*. Bila *Voters*memutuskan untuk memilih *(to vote)* maka *voters* akan memilih/mendukung kandidat tertentu.

Tingkah laku politik seseorang sangat dipengaruhi oleh situasi komunitas dimana seseorang berada, karenanya untuk memahami tingkah laku Individual, termasuk keputusan memilih dalam pemilu, harus dihubungkan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat.Selanjutnya, interaksi antar anggota masyarakat, yang kemudian menentukan interprestasi seseorang terhadap suatu fenomena sosial.

Dalam ilmu politik untuk menjelaskan tingkah laku politik, dikenal adanya dua pendekatan besar (umum) untuk menerangkan tingkah laku politik pada saat berlangsungnya pemilu, yaitu pendekatan sosiologis *(Colombia school)* atau lebih dikenal dengan Mazhab Columbia dan pendekatan aspek sosio psikologis *(Michigan Shool)*atau dikenal dengan Mazhab Michigan.

- Pendekatan sosiologis*(Colombia School)*

  Pendekatan ini menerangkan gejala memberikan suara berdasarkan atas latar belakang sosial-ekonomi para pemilih.Pendekatan ini berkembang pertama kali di benua Eropa.Pendekatan ini memandang masyarakat terdiri atas status hirarkhis. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat struktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas, (status sosial), pekerjaan, dan lainya.

  Seymour Martin Lipset seperti dikutip oleh Himawan (1993.3) misalnya, mengajukan sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku orang menentukan pilihan politiknya. Variabel-variabel tersebut adalah: pendapat (income), ras, jenis kelamin, umur, status kewarganegaraan, dan partisipasi sosial. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam pemilu perilaku pemilih dipengaruhi oleh latar belakang karakteristik sosial-ekonomi sebagai basis pengelompokan sosial diantara pemilih. Pengelompokan sosial ini berpengaruh terhadap kelas sosial pemilih, status ekonomi pemilih, pendidikan pemilih dan agama yang dianut oleh pemilih.

  Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang Sosiologis berusaha memahami perilaku pemilih dari perspektif hirarki kelompok sosial yang ada dalam masyarakat.Kelompok sosial tersebut, bisa letakkan dalam berbagai kategorisasi, seperti kelas, agama, etnisitas, pekerjaan, penghasilan dan lain-lain.

- Pendekatan Sosio Psikologis *(Michigan school)*

  Pendekatan ini sebenarnya merupakan respons terhadap pendekatan yang pertama. Pendekatan ini mengemukakan aspek sosial-psikologis yang menentukan tindakan memilih, yang dikembangkan oleh *"The Survey Research Center University of Michigan"*. Karena itu, model ini lebih dikenal sebagai *michigan school*, atau "Mazhab Psikologi". Mengamati para pemilih dalam pemilu Amerika Serikat, mazhab Psikologi ini membangun asumsi bahwa penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis penentuan untuk memilih atau memihak kepada satu kesatuan politik dipandang sebagai produk dari sikap dan disposisi psikis Para pemilih. karena itu, menurut Imawan *"voting is In The End an oct of Individuals and the motives for this act must be be sought in psychological foces of individual human beings"*.

Mazhab psikologis ini percaya bahwa tingkah laku memilih dariseseorang dapat dideteksi dengan dua konser. Pertama, disebut political involvement, yakni perasaan penting atau tidak untuk terlibat ke dalam isu-isu politik yang bersifat umum (general). Kedua disebut *party identification*, yakni*preferensi* (perasaan suka atau tidak suka) dari seseorang terhadap suatu partai atau kelompok politik tertentu. Satu hal yang menarik untuk dikemukakan adalah sekalipun seseorang Serikat atau berafiliasi dengan satu partai tertentu, tidak berarti bahwa norma partai yang ada akan menentukan pilihannya. pilihan atau tindakan politik seseorang, sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang isu-isu kontemporer yang berkembang dalam masyarakat, isu-isu ini dapat beebentuk bisu jangka pendek *(Short Tern Issue)* dan isu jangka panjang *(Long Term Issue).*

Selanjutnya Paul Alien Beck seperti dikutip Imawan mengatakan: "*The American voter employs virtually all of the concepts conventionally drawn upon in analyzing voter choice; attitudes toward parties, candidates, and issues, party loyalties, loyalities, ideology, election laws, sosial group membership, sosial calss, economic outlooks, farm conditions, goedraphical mobility, education, sex, personality and party performance."* Dari pendapat tersebut sebenarnya dapat dikelompokkan keadaan enam faktor. Keenam faktor itu: (1) identifikasi terhadap partai; (2) persepsi pemilih terhadap atribut-atribut pribadi masing-masing calon (candidate); (3) kepentingan kelompok yang mereka wakili; (4) isu-isu politik dalam negeri; (5) isu-isu politik luar negeri; (6) penampilan pakai dalam pengelolaan pemerintahan.

1) Pendekatan Rasional

Pada kenyataannya sebagai pemilih mengubah pilihan politiknya dari satu pemilihan kepunahan lainnya peristiwa atau kejadian politik dan sosial tertentu dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang.Kegiatan-kegiatan tertentu seperti acara kumpul-kumpul misalnya Majelis Ta'lim atau pengajian jika dikemas dengan substansi atau strategi tidak mustahil dapat pula mempengaruhi mempengaruhi preferensi pemilih.

Ketertarikan pemilih pada isu-isu tertentu dan figur kandidat yang ditawarkan oleh partai politik bersifat situasional dan tidak selalu permanen dan bisa berubah-ubah, dan tidak terlepas dari peristiwa sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung menjelang dan selama pemilu.Dalam pendekatan rasional,perilaku pemilih ditentukan pula oleh faktor-faktor tertentuseperti prosedur dan aturan main dalam pilkada.Bahkan aturan main yang menguntungkan calon tertentu (yang biasanya disertai ancaman dan paksaan) merupakan salah satu strategi kunci calon aktif memenangkan Pemilu.Faktor lainnya adalah imbalan ekonomi dan barang lainnya terutama yang ditunjukkan oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi mempengaruhi perilaku mereka.

Pendekatan rasional menekankan bahwa para pemilih benar-benar rasional dalam memilih dan melakukan penilaian yang valid terhadap kandidat. Pemilih rasional biasanya memiliki sifat rasional sebelum menjatuhkan pilihannya, motivasi yang tinggi, prinsip yang kuat, memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup luas pilihan mereka terhadap kandidat bukanlah faktor kebetulan atau kebiasaan,bukan pula untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum. Adapun ciri-ciri pemilih rasional menurut Nursal (2004:67) antara lain: (1) Dapat mengambil

keputusan bila dihadapkan pada suatu alternatif; (2)Dapat membandingkan Apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama dengan atau lebih rendah dibandingkan alternatif lain; (3) Menyusun alternatif secara alternatif; (4) Memilih alternatif yang tingkah prelerensinya lebih tinggi; (5) Selalu mengambil keputusan yang sama bila diharapkan pada alternatif yang sama.

2) Pendekatan Domain Kognitif (*Political Marketing*)

Newman & Sheth seperti di kutip Nursal mengembangakan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terlibat dengan marketing dalam pengembagan model tersebut. Mereka menggunakan dasar pemikiran bahwa perilaku pemilih berdasarkan kepada sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari sumber seperti komunikasi dari mulut ke mulut, media masa (baik elektronik maupun cetak). Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih. Nursal mengemukakan bahwa; " *Political marketing* bertujuan untuk "membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi perilaku pemilih. Perilaku pemilih diharapkan adalah ekspresi pendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu".

Menurut Nursal ada lima hal mengapa political marketing bisa berkembang di Indonesia: (1) Sistem multi partai yang memungkinkan siapa saja boleh memberikan partai politik dan konsekuensinya menyebutkan persaingan tajam antara parpol; (2) Pemilih telah lebih bebas menentukan pilihannya dibandingkan pemilu sebelumnya, sehingga syarat bagi perempuan politicul marketing terpenuhi; (3) Partai-partai lebih bebas menentukan platform dan identitas organisasinya; (4) Pemilu merupakan momentum sejarah dalam perjalanan bangsa sehingga pihak-pihak kepentingan terutama para elit politik akan berusaha keras untuk ambil bagian; (5) Sistem pemilihan anggota parlemen, DPD, dan presiden secara langsung, yang kelak akan diikuti oleh pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Keempat model tersebut sama lain saling menguatkan dan saling melengkapi. Akan tetapi, model-model tersebut tidak dapat begitu saja ditetapkan untuk menganalisis kehidupan politik di Indonesia, baik dalam Pemilu maupun Pemilukada. Menurut Imawan setidaknya ada empat perbedaan mendasar antara pengamatan empiris di Amerika Serikat dengan situasi di Indonesia, keempat perbedaan tersebut adalah: *Pertama,* budaya politik di Amerika Serikat terkesan "sangat demokratis",dimana pemilih dengan sadar dan penuh kebebasan dapat menentukan pilihannya sendiri.Sebaliknya di Indonesia, yang baru "belajar demokrasi" faktor mobilisasi dan juga faktor *euforia* demokrasi sangat menentukan dan keberanian seseorang dalam menentukan pilihannya. *Kedua,* sistem informasi di Amerika Serikat sudah sangat maju, sehingga kemungkinan masyarakat menerima informasi secara luas dan terbuka, yang memungkinkan pilihan berpikir sosial alternatif pilihan secara rasional. sebaiknya di Indonesia, meskipun kebebasan pers sudah terbuka pemilih belum dapat mencerna informasi politik secara luas dan mendalam sebelum menentukan pilihannya.Ada beberapa sebab, antara lain kebebasan pers selama ini cenderung "kebablasan" masih kentalnya pola hubungan patron klien dan juga sentimen *primordialisme* dalam masyarakat Indonesia.

Ketiga, praktek politik di Amerika Serikat mengenal sistem kandidat. Masyarakat secara langsung mengenal wajah ataupun ide-ide dari calonnya, sehingga

orang memilih wakilnya sesuai dengan kualitas kandidat yang sebenarnya.Sebaliknya, di Indonesia praktek politik dengan sistem kandidat baru pertama kali dilaksanakan yaitu pada pemilihan presiden secara langsung, dan pada Pemilukada tahun 2005. Dalam pemilu legislatif, sistem ini masih dikombinasikan dengan sistem gambar, sehingga urutan kandidat masih "ditentukan" oleh partai politik yang bersangkutan.Dalam sistem ini sangat dikemungkinan adanya calon yang tidak mampu tetapi ditempatkan di nomor urut atas dan calon yang mampu ditempatkan di nomor urut bawah, sehingga sistem ini sangat menguntungkan calon yang berada di nomor urut atas. *Keempat*, pelapisan sosial di Amerika Serikat didasarkan atas ekonomi (seperti pola Marxian). Di Indonesia, status sosial itu bisa diperoleh dari keturunan (misal bangsawan), atau karena keyakinan agamanya.Dari pola tersebut, konsep seperti "kanan-kiri", "liberal-konservatif", progresif-oposan" tidak dikenal dalam Khasanah politik Indonesia.

Salah satu penelitian tentang perilaku pemilih di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Afan Gaffar dalam penelitiannya di Jawa Tengah, ada empat variabel yang menjelaskan pemilu perilaku pemilih.*Pertama*. Keyakinan sosio-religius, Keyakinan keagamaan merupakan variabel yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pilihan seseorang terhadap partai politik. *kedua* , adalahidentifikasi partai dalam konteks ini, perilaku pemilih sangat tergantung pada persoalan psikologis, Maksudnya sejauhmana seseorang merasa dekat secara psikologis (secara emosional) dengan partai tertentu maka sejauh itulah ia akan memilih kandidat.Kekuatan psikologis ini dapat dibentuk melalui institusi yang bernama sosialisasi.*Ketiga,*pola kepemimpinan, dalam masyarakat Jawa terhadap dua pemimpin, yaitu;Pemimpin birokratif formal dan pemimpin non formal.Perilaku pemilih biasanya sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin non formal seperti; Kyai, Haji, guru,dukun dan lain-lain.*Keempat,* klas atau status sosial.Menurut konsep ini, klas atas yang berstatus sosial yang tinggi akan memilih parpol (dalam hal ini Kepala Daerah-*pen)* yang *status quo*, sedangkan mereka yang berada di klas bawah yang berstatus sosial rendah akan memilih partai (Kepala Daerah) yang *non status quo* bahkan oposan.

Selain hal tersebut di atas, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan suaranya adalah karakteristik sosial, Adapun karakteristik sosial yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemberian suara yaitu: pendidikan, pekerjaan, penghasilan, tiap jenis kelamin".Begitu pula dengan pengelompokan sosial, seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan lain-lain, mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih.

Selain hal tersebut di atas, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan suaranya adalah karakteristik social. Adapun karakteristik sosial yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemberian suara yaitu: pendidikan, pekerjaan, penghasilan, tiap jenis kelamin". Begitu pula dengan pengelompokan sosial, seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan lain-lain, mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih.

KESIMPULAN

Pasca gerakan Reformasi 1998, Indonesia mengalami proses transisi yang melibatkan pelembagaan politik sebagai upaya konsolidasi demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Proses transisi telah menghasilkan beberapa hal positif bagi bangsa Indonesia, termasuk didalamnya meningkatkan partisipasi politik rakyat.preferensi pemilih dari kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas Wilalodra Indramayu. Perilaku memilih dapat ditunjukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pejabat publik dalam Pemilu. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, menurut peneliti adalah kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik serta kepercayaan pada pemerintah: penilaian seseorang terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Adman, Nursal. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Angus, Campbel.1976. *The American Voter*. Unbridge Edition: University of Chicago Press.

Elderveld, J Samuel dalam Riswanda Imawan.1993. *Analisis Hasil Pemilihan Umum di Indonesia (Laporan Penelitian)*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM.

Gaffar, Affan. 1992. *The Javanes Voters: A Case Studi of Election Under Hegemoni: Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadari, Nawawi. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Horald, F Gosnel. 1934. *Ensyklopedia of The Social Science*. New York: Me Grew Hill Book Company.

Huntington, P Samuel. Dan Joan Nelson. 1994. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Irawan, Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosda Karya

Jaros, Dean. 1974. *Political Behaviour Choice and Perspektif*. New York: St. Martin Press.

Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Syaukani, HR, Affan Gaffar, dan Ryas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan.